



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERCEPATAN PEMBANGUNAN 2.200 DAPUR SPPG

Brigita Diaz Primadita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
brigita.primadita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan 2.200 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Kementerian PU bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim teknis yang bertugas menyusun rencana kerja terukur. Pembangunan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan target minimal tiga dapur SPPG di setiap kabupaten. Hingga 7 Juli 2025, sebanyak 1.873 dapur telah selesai dibangun. Melalui percepatan ini, akan ada tambahan sebanyak 473 unit, sehingga seluruh 2.200 dapur SPPG sudah dapat beroperasi pada tahun 2025.

Percepatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan BGN yang telah ditandatangani pada bulan Maret lalu. Program MBG merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam Asta Cita dan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta penguatan ekonomi rakyat secara bersamaan. Dapur SPPG akan menjadi pusat distribusi makanan bergizi harian bagi pelajar. Pembangunan dapur SPPG dapat menciptakan lapangan kerja lokal, memperkuat rantai pasok pangan lokal, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Kementerian PU bertanggung jawab dalam proses konstruksi, menyusun panduan teknis, dan menyusun standardisasi bangunan dapur SPPG. Pembangunan akan dilaksanakan dengan skema swakelola di mana pengerjaan barang dan jasa dilakukan langsung oleh Kementerian PU dengan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk 1.542 dapur baru atau sekitar Rp3,9 milyar per dapur. Terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses konstruksi dapur SPPG. *Pertama*, dapur harus memiliki fungsi dan standar desain yang memungkinkan pembangunan secara cepat dan efisien di berbagai wilayah. Fasilitas wajib memenuhi standar keamanan pangan, menyediakan sistem air bersih yang layak, serta memiliki pengelolaan limbah makanan yang ramah lingkungan. *Kedua*, aspek keamanan bangunan harus menjadi prioritas. Struktur bangunan perlu dirancang tahan lama, tahan terhadap kondisi iklim lokal, serta memenuhi standar keamanan kerja dan pencegahan kebakaran, termasuk penggunaan material tahan api dan penyediaan alat pemadam.

Ketiga, aksesibilitas lokasi dapur sangat krusial. Dapur sebaiknya tidak dibangun di area rawan bencana seperti banjir atau longsor, memiliki akses jalan yang memadai, serta dekat dengan lokasi penerima manfaat untuk menekan biaya transportasi, memastikan distribusi efisien, dan menjaga kesegaran makanan. *Keempat*, akuntabilitas dan transparansi dalam proses konstruksi perlu diperhatikan. Kewenangan setelah proses serah terima dan perawatan setelah selesai SPPG dibangun harus jelas. Selain itu, proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sebaiknya terdokumentasi dengan baik, termasuk laporan rutin progres fisik dan keuangan, guna meminimalisasi risiko penyelewengan anggaran mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Sebagai catatan, pada program pilot MBG pada bulan Maret lalu di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah), Kota Banjar (Jawa Barat), dan Kota Jambi (Jambi), pembangunan satu unit dapur SPPG memerlukan anggaran sekitar Rp4,5 miliar. Anggaran tersebut mencakup fasilitas produksi makanan, sanitasi, peralatan masak, dan kendaraan distribusi. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan dan pengawasan harus dipastikan bahwa realisasi anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan dapur yang berkualitas, layak, berfungsi optimal, dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Kementerian Pekerjaan Umum melakukan percepatan konstruksi 2.200 dapur SPPG dalam rangka program Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta pengelolaan anggaran dalam percepatan pembangunan dapur SPPG. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah agar pembangunan dapur SPPG berjalan tepat waktu, tepat mutu, berkelanjutan, dan memperhatikan pemerataan wilayah terutama di daerah 3T. Anggaran pembangunan yang digunakan juga agar dikelola secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah harus dapat menjamin fungsi, desain, dan aksesibilitas lokasi dapur SPPG memenuhi standar yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam konstruksi, sehingga menghasilkan dapur SPPG yang berkualitas, layak, dan berfungsi optimal.

Sumber

antaranews.com, 18 Juli 2025;
ekonomi.bisnis.com, 17 Juli 2025;
finance.detik.com, 17 Juli 2025;
kompas.com, 7 Juli 2025; dan
metrotvnews.com, 16 Mei 2025 & 7 Juli 2025

Minggu ke-3 Juli
(14 s.d. 20 Juli 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*